
**IDENTIFIKASI POTENSI MODAL SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

Oleh

Rola Pola Anto¹, La Ode Sahili², Sitti Rahmatyah³, Gunawan⁴, Risman Togala⁵^{1,2,3}Universitas Lakidende, Unaaha, Indonesia⁴Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia⁵Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari, IndonesiaEmail: antorolapola@gmail.com**Abstrak**

Identifikasi potensi modal sosial di Kabupaten Konawe Kepulauan sangat penting untuk mengetahui kesenjangan pembangunan, pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Hal ini terjadi ketika masih bergabung dengan Kabupaten Konawe sebagai kabupaten induk. Akses dan distribusi program pembangunan yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat di Pulau Wawonii mengalami kemiskinan di wilayah kecamatan hingga desa/kelurahan. Pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan berhasil diidentifikasi adanya *social networking*, yakni adanya jaringan sosial bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, *social economic networking* adanya jaringan jual-beli hasil bumi dan produksi tertentu; *mutual trust* adanya rasa saling percaya secara turun-temurun, *reciprositas* adanya perilaku saling tolong-menolong yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat; *value and social norm*, adanya nilai dan norma sosial sebagai warisan secara turun-temurun yang tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, dan *participation in social organization* yakni adanya organisasi sosial/perkumpulan usaha yang tumbuh dari bawah melalui inisiatif dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini penting bagi penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: Identifikasi, Modal Sosial, dan Kemiskinan**PENDAHULUAN**

Model kebijakan pembangunan Indonesia sejak memasuki era reformasi, secara formal mencakup seluruh aspek pembangunan melalui pendekatan yang bersifat komprehensif. Namun demikian, strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, masih fokus pada upaya pembangunan ekonomi yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita yang memadai, guna mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat. Fokus dan pendekatan model pembangunan tersebut, mengadopsi nilai-nilai modernisasi dari negara-negara industri maju yang berlangsung pada seluruh sendi-sendi

kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pengalaman di era tahun 1970-an, di awal pemerintahan orde baru, paradigma modernisasi yang melandasi kebijakan dan prioritas pembangunan di Indonesia. Modernisasi yang menghasilkan pembangunan ternyata berdampak pada perubahan sosial di Indonesia dan secara khusus mempengaruhi kapasitas modal sosial (*social capital*).

Social capital menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang pola pembangunan manusia karena dalam pola ini, manusia diposisikan sebagai subjek penting yang menentukan arah pelaksanaan pembangunan. Komitmen, kapasitas dan partisipasi mengorganisasikan diri menjadi lebih penting agar masyarakat dapat berkiprah

dalam pola pembangunan manusia. Pada hal, kedua kapasitas tersebut baru bisa berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat. Keberadaan modal sosial juga menjadi penting dalam penanggulangan kemiskinan karena pengentasan kemiskinan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga perluasan akses terhadap sumber daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan *network* dan *mutual trust* di kalangan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki kondisi masyarakat yang heterogen dari berbagai etnik dengan dukungan potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti sumber daya agraris, hortikultura, hutan, perikanan/kelautan, pertambangan dan sebagainya. Potensi-potensi tersebut tidak hanya cukup dikelola oleh suatu kebijakan yang bersumber dari institusi pemerintah, akan tetapi mesti didukung oleh peran serta masyarakat, yang salah satunya adalah potensi modal sosial.

Pengidentifikasi potensi modal sosial di Kabupaten Konawe Kepulauan cukup vital mengingat salah satu permasalahan krusial, yaitu terkait dengan kesenjangan pembangunan, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat. Kesenjangan pembangunan di wilayah ini, nampak ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten induk Kabupaten Konawe. Faktor akses dan distribusi program pembangunan yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat di pulau Wawonii masih terperangkap dalam fakta dan realitas kemiskinan. Pasca pemekaran sebagai kabupaten baru tahun 2013/2014, Kabupaten Konawe Kepulauan berusaha meningkatkan program pembangunan di berbagai sektor, termasuk program dan strategi penanggulangan kemiskinan yang melekat di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dana penanggulangan kemiskinan bersumber dari

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan persoalan penting yang melintasi batas-batas wilayah administratif kecamatan hingga desa/kelurahan. Di sinilah pemerintah kabupaten berperan penting untuk menyusun desain kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas wilayah dan sektoral. Selama ini, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten telah menerapkan sejumlah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang cenderung berorientasi pada paradigma ekonomi, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dan yang terbaru Dana Desa dari Pemerintah Pusat.

Program memiliki manfaat dari aspek pertumbuhan yakni mampu mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi ditinjau dari segi efektifitas program terutama untuk mengurangi angka kemiskinan, pada dasarnya harus memberikan ruang partisipasi masyarakat secara aktif, inovatif, dan terorganisir dalam perumusan kebijakan di Kabupaten. Karena itu, dalam merumuskan desain kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu dikaji secara komprehensif terhadap program-program yang ada, dengan mempertimbangkan dimensi sosial budaya yang tercakup dalam modal sosial (*social capital*), terutama dengan memperhatikan elemen-elemen modal sosial yang dapat mendorong kiprah masyarakat seperti *social networking*, *mutual trust*), *reciprositas*, nilai dan norma sosial, dan partisipasi dalam asosiasi atau organisasi.

Beberapa hasil studi terkait modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan seperti studi Nasution (2016) menemukan bahwa modal sosial memiliki hubungan positif terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga, sehingga mengurangi kemiskinan. Artinya akumulasi modal sosial dapat meningkatkan

akses modal lain (modal manusia, modal keuangan, dan modal fisik) berkaitan dengan peningkatan penghasilan rumah tangga miskin. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam pengurangan kemiskinan. Kebijakan pengurangan kemiskinan tidak hanya terkait dengan peningkatan modal ekonomi, tetapi juga perluasan akses terhadap modal sosial. Akses rumah tangga miskin terhadap modal sosial dapat memfasilitasi peningkatan akses modal ekonomi melalui transmisi informasi, peluang kerja sama (perluasan jejaring sosial), dan sikap saling percaya.

Pujiharto (2018) bahwa unsur modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di desa Tempuran meliputi trust, norma dan jaringan. Unsur *trust* yang ada dalam kelompok afinitas berupa; kredibilitas, keterbukaan, kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Unsur norma yang ada di kelompok afinitas berupa kewajiban hadir pertemuan, sanksi sosial, mempertahankan aset ternak, kepedulian sosial dan keikhlasan pengurus berpengaruh terhadap perkembangan kelompok dalam pengentasan kemiskinan. Bentuk jaringan sosial yang ada di kelompok afinitas berupa: pertemuan rutin, *patron klien* juragan jagung petani, bakul kambing dan jimpitan Jaringan yang ada dalam kelompok afinitas mempermudah anggota dalam mengakses modal usaha pertanian, mempermudah penjualan ternak dan hasil pertanian. Sehingga bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di desa Tempuran.

Selanjutnya modal sosial berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan melalui akses pekerjaan (Zhang, Zhou, & Lei, 2017). Modal sosial mempermudah anggota komunitas dalam mengakses pembiayaan keuangan mikro (Akram & Routray, 2013), modal sosial mampu merubah pola pikir nelayan (Kusuma, Satria, & Manzilati, 2017), modal sosial mempermudah akses kesehatan. Berdasarkan kondisi empirik terkait dengan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan maka

terdapat unsur-unsur penting yang dapat mendukung penanggulangan kemiskinan yaitu *social networking*, *mutual trust*, *reciprositas*, nilai dan norma sosial. Dengan demikian studi ini berusaha untuk mengidentifikasi potensi modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan potensi modal sosial yang dapat mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

LANDASAN TEORI

Modal Sosial

Modal sosial sebagai seperangkat asosiasi antar manusia yang bersifat horisontal yang mencakup jaringan dan norma bersama yang berpengaruh terhadap produktifitas suatu masyarakat. Intinya Putnam (1995) melihat modal sosial meliputi hubungan sosial, norma sosial dan kepercayaan. Modal sosial memiliki 6 dimensi yaitu: (1) *social networking*; (2) *social economic networking*; (3) *mutual trust*; (4) *reciprositas*; (5) *value and social norm*; (6) *participation in social organization*. Modal bukan hanya sekedar alat-alat produksi, akan tetapi memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu : (a) *economic capital*, (b) *cultural capital*, dan (c) *social capital*. Modal ekonomi dikaitkan dengan kepemilikan alat-alat produksi. Modal kultural, terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Modal sosial, terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial (Bourdieu, 1986).

Nasution (2016) bahwa meskipun masih dalam perdebatan, peran modal sosial pada aspek sosial dan ekonomi merupakan suatu paradigma baru dalam pembangunan inklusif. Healy dan Hampshire, 2002 dalam Nasution (2016) Interaksi sosial terjadi karena adanya saling membantu antarindividu, antarkomunitas, dan antarkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Walaupun definisi modal sosial masih beragam dan dipahami

secara berbeda, telah terjadi konvergensi menuju pada jejaring sosial (*network*), norma (*norm*), dan nilai-nilai (*values*) yang memfasilitasi kerja sama (*collective action*). Coleman (2008) menjelaskan bahwa modal sosial menurut fungsinya, yaitu modal sosial itu bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen. Pertama, modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial. Kedua, modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku dalam struktur tersebut.

Collier (2002) dalam Nasution (2016) bahwa modal sosial dapat memengaruhi pengurangan kemiskinan rumah tangga melalui tiga jenis eksternalitas positif, Pertama, modal sosial memfasilitasi transmisi pengetahuan tentang perilaku orang lain, mengurangi masalah oportunistik melalui interaksi yang berulang, dan membangun rasa saling percaya antar anggota. Kedua, modal sosial memfasilitasi transmisi pengetahuan tentang teknologi dan pasar, mengurangi kegagalan informasi (asimetri informasi). Transmisi pengetahuan dapat terjadi dengan mengumpulkan informasi dalam konteks jejaring sosial baik interaksi satu arah maupun interaksi timbal-balik. Kedua eksternalitas ini dapat mengurangi oportunistik, yang dicapai melalui transaksi berulang dan reputasi. Ketiga, dengan mengandalkan norma dan aturan, modal sosial mengurangi masalah penumpang gelap (*free rider*), sehingga memfasilitasi tindakan kolektif dalam mencapai tujuan bersama (mengurangi kemiskinan).

Damsar dan Indriyani (2009), modal sosial adalah investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal lainnya. Selanjutnya Fukuyama (2002) menyakini bahwa kepercayaan sosial memainkan peran penting dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi, beberapa daerah gagal mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat karena rendahnya kepercayaan atau terbatasnya jangkauan kepercayaan.

Coleman (1988) bahwa modal sosial mencakup dua hal yaitu: (1) modal sosial mencakup aspek tertentu dari struktur sosial; dan (2) modal sosial memfasilitasi pelaku bertindak dalam struktur tersebut. Lebih lanjut Coleman juga mengembangkan pemahaman modal sosial yang meliputi asosiasi (hubungan) vertikal dan horisontal. Asosiasi vertikal ditandai dengan hubungan yang bersifat hirarkis dan pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antar anggota masyarakat. Hubungan semacam ini mempunyai konsekuensi positif maupun negatif. Sedangkan asosiasi horisontal adalah hubungan yang sifatnya egaliter dengan pembagian kekuasaan yang lebih merata. Coleman (1998) juga menyatakan bahwa modal sosial merupakan inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma dan menetapkan berbagai jenis sanksi bagi anggotanya. Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama. Woolcock (1998) mengajukan tiga dimensi dari modal sosial, yaitu *bonding*, *bridging* dan *linking*.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah utama secara jangka panjang yang harus digarap secara berkelanjutan sehingga dibutuhkan konsistensi dalam program pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan tidak bisa tuntas dikarenakan setiap pergantian pemimpin diikuti pergantian program sehingga tidak ada keberlanjutan program sebelumnya (Multifiah, 2011).

Kemiskinan adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai

dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2000). Suparlan dalam Ginanjar (2018) bahwa kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.

Sumedi dan Supadi dalam Ginanjar *et al* (2018) masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut (1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, 2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada, 3) rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan, 4) terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme, 5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan. Menurut Hartomo dan Aziz dalam Ginanjar *et al* (2018) bahwa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut yaitu: pendidikan yang terlampau rendah; malas bekerja; keterbatasan sumber alam; terbatasnya lapangan kerja; keterbatasan modal; beban keluarga.

Hasbullah (2006) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat termasuk pengentasan kemiskinan, merupakan sinergi dari sejumlah modal dalam komunitas yang terdiri dari: (a) *human capital* berupa kemampuan personal seperti pendidikan, pengetahuan, kesehatan, keahlian dan keadaan terkait lainnya; (b) *natural capital* seperti perairan laut; (c) *produced economic capital* berupa aset ekonomi dan finansial serta aset lainnya; dan (d) *social capital* berupa

norma/nilai (*trust, reciprocity*, norma sosial lainnya) dan partisipasi dalam jaringan, *pro-activity*.

Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Ginanjar *et al* (2018) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang harus konsisten dilakukan oleh pemerintah. Penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kebijakan pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen baik itu pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat terbatas. Karena itu harus ada pemahaman tentang peran strategis penanggulangan kemiskinan perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganannya dan didukung program kegiatan yang tepat sasaran pada keluarga miskin,

Todaro dalam Ginanjar *et al* (2018) bahwa dapat dikategorikan ke dalam kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kondisi di mana kemiskinan terjadi akibat faktor-faktor biologis, psikologis dan sosial (malas, kurang trampil, kurang kemampuan intelektual, lemah fisik, dll). Lingkungan fisik membuat orang sulit melakukan usaha atau bekerja. Sedangkan, kemiskinan struktural terkait dengan ketidakadilan dalam perbandingan nilai pertukaran (*terms of trade*) antara nilai barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh penduduk miskin dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang harus dibelinya; ketidakadilan dalam pembayaran jasa-jasa pekerja (upah yang rendah dan eksploitasi pekerja); dan, pengenaan pungutan yang memberatkan dan relative memeras penduduk miskin.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama dengan metode

analisis “Triangulasi”. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. Lokasi penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria kecamatan, desa/kelurahan dan tipologi/dinamika perkembangan masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah unsur aparat dan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui, ataupun terkait dengan program penanggulangan kemiskinan, baik sebagai penerima maupun sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Secara metodologis, ditetapkan 3 (tiga) Kecamatan sebagai sampel wilayah di antara 7 (tujuh) Kecamatan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu Kecamatan Wawonii Barat sebagai representasi dari Kecamatan yang berada di pusat perkotaan, Kecamatan Wawonii Utara sebagai kecamatan yang mewakili wilayah pinggiran dan Kecamatan Wawonii Tengah sebagai kecamatan yang mewakili wilayah transisional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 180 dan informan 22 orang yang tersebar pada 7 kecamatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian identifikasi potensi modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan *Social Networking*

Hasil studi ini menemukan bahwa masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai ***Social Networking*** antara sesama anggota masyarakat di daerah domisili (menurut 100% responden). Jaringan sosial masyarakat di daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tergolong cukup luas, yaitu mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, sampai pada jaringan antara provinsi. Selanjutnya, jaringan sosial tersebut, mencakup 3 (tiga) aspek sosial,

yaitu : (1) Jaringan sosial bidang pendidikan (menurut 100% responden); (2) Jaringan sosial bidang kesehatan (menurut 88,88% responden); (3). Jaringan sosial bidang keagamaan (menurut 51,55% responden). Hasil studi ini menunjukkan bahwa jaringan sosial yang berkembang di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat menjadi modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu aspek yang dapat mendorong penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah jaringan sosial bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang keagamaan. Hasil studi ini relevan dengan temuan Nasution (2016) bahwa modal sosial berperan penting dalam pengurangan kemiskinan. Kebijakan pengurangan kemiskinan tidak hanya terkait dengan peningkatan modal ekonomi. tetapi juga perluasan akses terhadap modal sosial. Hal ini dapat dimaknai bahwa dengan memanfaatkan jaringan sosial bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan dapat menjadi modal sosial yang dapat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Berdasarkan *Economic Social Networking*

Dalam studi ini ditemukan bahwa masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai *economic social networking* yang tergolong sangat kuat (menurut 88,88% responden). Selain itu jaringan sosial ekonomi mereka tergolong cukup luas, yaitu sampai pada tingkat provinsi (67,41% responden). Luasnya jaringan sosial ekonomi tersebut, mencakup jaringan jual-beli 7 (tujuh) jenis hasil produksi, yaitu (1) hasil laut; (2) hasil pertanian; (3) hasil hutan; (4) hasil industri/kerajinan; (5) hasil ternak; (6) barang-barang campuran; (7) barang-barang khusus. Jaringan kerja sama sosial ekonomi yang paling menonjol atau paling tinggi aktivitasnya adalah: (1) jaringan kerja sama jual beli hasil laut (menurut 70,37% responden); dan (2) jaringan kerja sama jual beli barang campuran (menurut 70,37% responden). Sedangkan jaringan kerja sama sosial ekonomi yang

paling rendah aktivitasnya adalah: (1) jaringan kerja sama jual-beli hasil ternak (menurut 40,74% responden); dan (2) jaringan kerja sama jual-beli hasil industri/kerajinan (menurut 37,04% responden). Temuan studi ini menunjukkan bahwa potensi modal sosial yang berkembang dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah jaringan sosial ekonomi dan jaringan kerjasama. Dengan demikian hasil studi ini dapat dimaknai modal sosial dengan indikator jaringan sosial ekonomi dan jaringan kerja sama pada dasarnya dapat mendorong dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan terciptanya jaringan sosial ekonomi dan kerjasama maka masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat menjalankan bisnis yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat sehingga secara langsung dapat mengurangi kesenjangan sosial khusus kemiskinan. Hasil studi ini sejalan dengan Nasution (2016) bahwa akses rumah tangga miskin terhadap modal sosial dapat memfasilitasi peningkatan akses modal ekonomi melalui transmisi informasi, peluang kerja sama (perluasan jejaring sosial), dan sikap saling percaya.

Berdasarkan Mutual Trust

Studi ini berhasil menemukan bahwa aspek saling percaya masyarakat di daerah penelitian ini (Kabupaten Konawe Kepulauan), tergolong sangat tinggi (menurut 95,56% responden). Rasa saling percaya dikalangan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, tumbuh secara turun-temurun (menurut 95,56% responden). Dari 10 (sepuluh) alasan tumbuhnya rasa saling percaya di kalangan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, semuanya tergolong kuat/tinggi, namun alasan yang paling kuat/tinggi adalah: (1) Alasan kesamaan profesi (menurut 100% responden); (2) alasan hubungan kawin-mawin (menurut 100% responden). Sedangkan alasan yang terendah adalah: (1) alasan kesamaan agama (menurut 66,67% responden); (2)

alasan kesamaan latar belakang pendidikan (menurut 66,67% responden). Temuan studi ini menunjukkan bahwa salah satu dimensi modal sosial dapat yang dapat mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah saling percaya dalam menjalankan kegiatan sosial budaya, perdagangan dan kegiatan bisnis. Hasil studi ini sejalan dengan Nasution (2016) bahwa akses rumah tangga miskin terhadap modal sosial dapat memfasilitasi peningkatan akses modal ekonomi melalui transmisi informasi, peluang kerja sama (perluasan jejaring sosial), dan sikap saling percaya. Studi ini sejalan dengan pendapat Fukuyama (2002) menyakini bahwa kepercayaan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, beberapa daerah gagal mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat karena rendahnya kepercayaan atau terbatasnya jangkauan kepercayaan.

Berdasarkan Reciprositas

Dalam studi ini juga berhasil ditemukan bahwa *reciprositas* dalam bentuk saling tolong-menolong bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, dimotivasi oleh rasa kewajiban untuk saling tolong-menolong sebagai sesama umat beragama (100% responden). Sikap untuk saling tolong-menolong antara sesama anggota masyarakat adalah suatu keikhlasan, tanpa adanya maksud atau harapan untuk mendapatkan pembalasan atau imbalan dari orang lain yang menerima pertolongan tersebut (menurut 100% responden). Terdapat 6 (enam) alasan adanya fenomena *responsibilitas* di kalangan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Selain dari adanya 2 (dua) hal yang memotivasi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk saling tolong-menolong, terdapat pula 6 (enam) alasan bagi mereka untuk saling tolong-menolong. Alasan yang paling kuat/tinggi adalah: (1) karena berasal dari daerah yang sama atau seasal (menurut 100% responden); (2) karena kesamaan adat-istiadat

(menurut 100% responden). Sedangkan alasan yang paling rendah, adalah kesamaan agama atau sama-sama beragama tertentu (menurut 66,69% responden). Temuan studi ini menunjukkan bahwa salah satu dimensi modal sosial dapat yang dapat mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah saling tolong menolong dalam menjalankan kegiatan sosial budaya. Hasil studi ini sejalan dengan pendapat Putnam melihat modal sosial meliputi hubungan sosial, norma sosial dan kepercayaan. Putnam (1995) mengemukakan bahwa modal sosial memiliki 6 dimensi yaitu: (1) *social networking*; (2) *social economic networking*; (3) *mutual trust*; (4) *reciprosita*. Dengan adanya saling tolong menolong maka kegiatan sosial budaya dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat mendukung penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Value and Social Norm

Bahwa *value and social norm* yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, adalah merupakan potensi modal sosial yang mudah diberdayakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan juga kebutuhan-kebutuhan kolektif bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Selanjutnya, dari 6 (enam) bentuk atau wujud nilai dan norma sosial yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, terdapat 3 (tiga) aspek yang tergolong sangat kuat, yaitu: (1) Hingga saat ini, sikap tolong-menolong oleh masyarakat, dilaksanakan secara sadar dan sukarela; (2) Ada wadah atau pengurus yang dibentuk untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan gotong-royong bagi masyarakat; (3) Ada aturan tidak tertulis, namun sudah menjadi pemahaman umum masyarakat, tentang pentingnya sikap tolong-menolong antara sesama anggota masyarakat; (masing-masing diakui oleh 100% responden); Sedangkan aspek yang tergolong peringkat

terbawah namun masih masuk kategori sangat kuat, adalah sikap saling menerima kelebihan dan kekurangan sehingga tidak mengalami hambatan untuk saling bekerja sama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya (diakui oleh 88,88% responden). Hasil studi ini dapat dimaknai bahwa salah satu dimensi modal sosial dapat yang dapat mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah adanya nilai dan norma sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Damsar dan Indriyani (2009), modal sosial adalah investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal lainnya

Berdasarkan Participation in Social Organization

Bahwa dilihat dari dimensi Partisipasi dalam Organisasi sosial bagi masyarakat di Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, ternyata bahwa di kalangan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, tumbuh dan berkembang organisasi-organisasi sosial yang merupakan prakarsa dari kalangan masyarakat itu sendiri, Dalam arti bahwa organisasi-organisasi sosial tersebut, tumbuh dari bawah atas dasar kesadaran dan inisiatif masyarakat itu sendiri, tanpa adanya intervensi dari pihak pemerintah setempat (menurut 100% responden). Organisasi sosial yang terbentuk di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri dari 12 (dua belas) jenis organisasi sosial/perkumpulan profesi pelayanan jasa dan penghasil produksi tertentu. Dari keduabelas jenis organisasi tersebut, terdapat 2 (dua) organisasi sosial yang paling dominan dan paling aktif keanggotaannya, yaitu: (1) organisasi sosial yang dibentuk berdasarkan kesamaan suku (menurut 88,88% responden); (2) organisasi sosial yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama (menurut 88,88% responden). Sedangkan perkumpulan

profesi pelayanan jasa dan produksi barang tertentu, masing-masing menempati peringkat kesebelas (menurut 48,48% responden) dan peringkat keduabelas (menurut 33,33% responden). Namun demikian, data menunjukkan bahwa seluruh (100%) anggota dari organisasi sosial/perkumpulan profesi tersebut, tergolong aktif mengikuti kegiatan organisasi atau perkumpulan. Studi ini menunjukkan bahwa salah satu dimensi modal sosial dapat yang dapat mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah adanya partisipasi dalam organisasi. Anggota masyarakat yang rajin dalam kegiatan organisasi dalam masyarakat dapat menjadi mendukung dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Hasil studi ini sejalan dengan pendapat Coleman (2008) menjelaskan bahwa modal sosial menurut fungsinya, yaitu modal sosial itu bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen. Pertama, modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial. Kedua, modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku dalam struktur tersebut

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terungkap dapat disimpulkan bahwa potensi modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki dimensi sebagai berikut: *Social networking*: Jaringan sosial di kalangan masyarakat cukup luas, seperti jaringan sosial bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. *Economic Social Networking*, di kalangan masyarakat cukup luas, jaringan tersebut mencakup jaringan jual-beli asil bumi dan produksi tertentu. *Mutual trust*. Dimensi ini tergolong cukup kuat, di kalangan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, tumbuh rasa saling percaya secara turun-temurun dan adanya kesamaan profesi. *Reciprositas*. adanya saling tolong-menolong yang sudah

mengakar dalam kehidupan mereka yaitu rasa kewajiban sebagai umat beragama untuk saling tolong-menolong dan dilakukan dengan ikhlas, karena berasal dari daerah yang sama dan kesamaan adat-istiadat. *Value and Social Norm*. Dalam kehidupan masyarakat terdapat, nilai dan norma sosial merupakan warisan secara turun-temurun, tumbuh dan mengakar dalam kehidupan mereka, karena ada aturan tidak tertulis tentang nilai dan norma sosial, namun sudah menjadi pemahaman umum masyarakat; sikap saling tolong-menolong; kesadaran bergotong royong, dan sikap untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan. *Participation in social organization*, yakni terdapat organisasi sosial/perkumpulan usaha yang tumbuh dari bawah melalui inisiatif dan kesadaran masyarakat, tanpa intervensi pemerintah. Kelebihan penelitian karena dapat mengungkapkan potensi modal sosial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Hasil studi ini memiliki keterbatasan karena lokus studi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk itu penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dan difokuskan pada studi khusus aspek *human capital*, *economic capital* dan *cultural capital* dalam penanggulangan kemiskinan.

Saran

Sehubungan dengan hasil identifikasi potensi modal sosial dan sinerginya dengan penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, direkomendasikan perlu adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan survei awal untuk menginventarisasi potensi modal sosial lainnya, yaitu modal sumber daya manusia; modal sumber daya alam; modal fisik (prasarana pendukung); modal keuangan. menyusun program dan kegiatan organisasi/perkumpulan yang telah dilembagakan, berdasarkan ketersediaan potensi dari keempat modal lainnya tersebut, untuk disinergikan dengan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sebaiknya dalam membuat kebijakan dan kegiatan

pelatihan dan penyuluhan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, adat, pemuda, tokoh wanita, para pimpinan organisasi masyarakat dan organisasi pemuda, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berorientasi pada upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ginanjar, R. A. F.; Sugeng S., Umayatu. S. (2018) Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten, *Jurnal Ekonomi-Qu*, (Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 8, No. 2, Oktober 2018, 227-248.
- [2] Nasution, A. (2016) Peranan Modal Sosial Dalam Pengurangan Kemiskinan Rumah Tangga Di Perdesaan Indonesia (*The Role of Social Capital on Household Poverty Reduction in Rural Areas of Indonesia*) *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016 171 – 183.
- [3] Pujiharto, S., Maryunani & Asfi M. (2018) Identifikasi Modal Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Semarang, *Sosio Konsepsia* Vol. 8, No. 01, September - Desember, Tahun 2018, 14-29
- [4] Zhang, Y., Zhou, X., & Lei, W. (2017). Social Capital and Its Contingent Value in Poverty Reduction: Evidence from Western China. *World Development*, 93, 350–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.034>.
- [5] Akram, S., & Kumar Routray, J. (2013). Investigating causal relationship between social capital and microfinance. *International Journal of Social Economics*, 40 (9), 760–776. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2012-0113>
- [6] Kusuma, U. A., Satria, D., & Manzilati, A. (2017). Modal Sosial dan Ekowisata : Studi Kasus di Bangsring Underwater, Banyuwangi. *JIEP*, 17.
- [7] Putnam. Robert D, (1995). “Bowling Alone : America’s Declining Social Capital. Dalam *Jurnal Democracy*, Vol. 6 No.1.
- [8] Bourdieu, P. (1986). *The Form of Capital*. In J. Richardson (Ed). *Handbook of teory and Research for Sociology Education*. New York: Greenwood Press.
- [9] Fukuyama, F.. (1995). *Trust : The Social Virtue and The Creation of Property*. New York : Free Press.
- [10] Coleman, J. S.. (1998). *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- [11] Damsar, & Indriyani. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia
- [12] Fukuyama, F. (2002). *Trust; Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- [13] Coleman, J. (2008). *Dasar Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- [14] Multifiah. (2011). Telaah Kritis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Tinjauan Konstitusi. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(1), 1–27.
- [15] Woolcock. (1998). *Community Services, Theory and Concep*. Chambridge : Harvard Press.
- [16] Hasbullah, J. (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press
- [17] Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.